

**SILA “KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA”
DALAM DIALOG DENGAN TEOLOGI PEMBEBASAN ALOYSIUS
PIERIS**



Oleh:

Rivaldi Angga Kurniawan

01110032

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada

Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana

Yogyakarta

Juni 2016

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**SILA “KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA” DALAM
DIALOG DENGAN TEOLOGI PEMBEBASAN ALOYSIUS PIERIS**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**Rivaldi Angga Kurniawan
01110032**

dalam Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Teologi

Fakultas Teologi

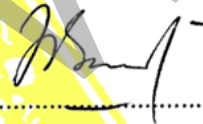
Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Sains Teologi pada tanggal 12 Agustus 2016

Nama Dosen

Tanda tangan

Prof. Dr. J. B. Giyana Banawiratma
(Dosen Pembimbing)



Pdt. Prof. E. Gerrit Singgih, Ph.D
(Dosen Penguji)



Pdt. Dr. Wahyu Nugroho
(Dosen Penguji)




Yogyakarta, 12 Agustus 2016

Disahkan oleh

Dekan,

Ketua Program Studi,




Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS., Ph.D



Pdt. Jeniffer F. P. Wowor, M.A.

Discover yourself until very end of life

~me

© UKDW

*Untuk mama dan papa ku
Yang membebaskanku ke dalam kehidupan*

Untuk adik-adikku, Yosua dan Eirene

*Dan untuk kekasihku
Triana Prahastiwi Wulandari*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Sang Pencipta yang memberikan kehidupan dan berkatNya. Skripsi ini merupakan salah satu titik penting dalam perjalanan hidup penyusun karena berbagai pergumulan internal dan eksternal yang terjadi. Namun berbagai pergumulan terlewati, dengan berbagai pelajaran dan refleksi, diiringi berbagai emosi dan janji. Integrasi proses kehidupan, itulah idealisme penyusun.

Aloysius Pieris sebagai teolog pembebasan yang penyusun angkat, menekankan pembebasan umat manusia dari penindasan. Tema pembebasan meresap ke dalam hidup penyusun setelah semakin menyadari bahwa di era globalisasi yang memudahkan batas-batas kehidupan, manusia dan komunitasnya justru banyak yang semakin membangun sekat-sekat untuk menjaga keberadaannya. Sistem yang menindas juga demikian. Era keterbukaan membuat kita semakin menyadari bahwa selama ini banyak yang disembunyikan. Sistem sosial dan sistem moral akan semakin dinamis seiring kehidupan menampakkan wajah-wajah yang beranekarupa.

Di samping pergumulan eksternal, penyusun juga mengalami pergumulan internal. Musuh terbesar ialah diri sendiri, tatkala penyusun mengalami masa transisi kehidupan dari masa remaja-pemuda kepada masa dewasa (setidaknya secara usia). Bukan pencarian jati diri yang penyusun persoalkan, melainkan detail-detail dalam proses berpikir dan konsep-konsep yang dibangun bersama konsistensi dan integritas dalam ranah praktis. Harmonisasi ide dan praktik dalam ketegangan yang semakin menarik.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing, Prof. Dr. J. B. Giyana Banawiratma yang membimbing dengan kesabaran dan kebijaksanaan yang luar biasa. Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta yang menjadi tempat dan keluarga bagi penyusun selama menempuh proses studi (sarjana dan program seminari/profesi). Ucapan terimakasih yang tidak terhingga penyusun haturkan kepada orang tua, Pdt. Joko Wahyudi dan Ari Budiningsih yang telah membebaskan putra putrinya menuju kepada kehidupan dan kemandirian. Terimakasih penyusun haturkan kepada kekasih, Triana Prahastiwi Wulandari yang menjadi mempersiapkan diri menjadi teman hidup bagi penyusun. Terimakasih juga penyusun haturkan kepada keluarga di Solo, kepada kawan-kawan *brotherhood* di kontrakan Ronodigdayan (*brotherhood* jilid satu Irvan, Teguh, Adi, Mas Andri, dan Jeko; *brotherhood* jilid dua Elia, Samuel Joni Sembiring, Mas Andri, dan Jeko; teman diskusi selama setahun Jeko dan Mas Andri), dan kawan-kawan Angkatan 2011 S1

Fakultas Teologi. Penyusun mengingat kawan-kawan yang ujian dalam bulan yang sama, yang berproses bersama dalam diskusi-diskusi dan simulasi ujian Elia, Irene, Michael, Yemima, Essy, dan Titin. Terimakasih juga kepada Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa yang menjadi komunitas penyusun dalam kehidupan beriman.

©UKDWN

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya menyatakan bahwa di dalam skripsi ini tidak ada karya ilmiah lain yang saya gunakan kecuali yang sudah saya kutip secara tertulis dan terdapat dalam daftar pustaka saya. Sepanjang pengetahuan saya selama proses penulisan skripsi ini, tidak ada tulisan atau topik yang sama dengan tulisan atau topik yang saya tulis dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 16 Agustus 2016



Rivaldi Angga Kurniawan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Pernyataan Integritas	vi
Daftar Isi	vii
Abstrak	x
Bab 1 Pendahuluan	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Judul Penelitian	7
1. 3. Pertanyaan Penelitian	7
1. 4. Batasan Penelitian	7
1. 5. Tujuan Penelitian	7
1. 6. Metode Penelitian	7
1. 7. Sistematika Penulisan	8
Bab 2 Sejarah dan berbagai Pandangan mengenai Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	9
2. 1. Sejarah Pancasila di sekitar dan pada Masa Kemerdekaan	9
2. 1. 1. Fase “Pembuahan”	9
2. 1. 2. Fase Perumusan	10
2. 1. 3. Fase Pengesahan	12
2. 2. Masa Soekarno	13
2. 2. 1. Sila ke-lima menurut Soekarno	13
2. 2. 2. Sila ke-lima menurut Mohammad Hatta	15
2. 3. Masa Soeharto	16
2. 3. 1. Sila ke-lima menurut Panitia Lima	16
2. 3. 2. Sila ke-lima T. B. Simatupang	18
2. 4. Masa Reformasi dan sesudahnya	19
2. 4. 1. Sila ke-lima menurut Yudi Latif	19
2. 5. Makna dari Ide Keadilan Sosial	20
2. 6. Kesimpulan	22

Bab 3 Teologi Pembebasan Aloysius Pieris	23
3. 1. Tentang Aloysius Pieris	23
3. 2. Yesus dan Kristus	24
3. 3. Yesus, Kemiskinan, dan Mamon	25
3. 3. 1. Dua Macam Kemiskinan	25
3. 3. 2. Mamon	26
3. 3. 3. Yesus dan Kemiskinan	28
3. 4. Yesus dan Kerajaan Allah	29
3. 4. 1. Spiritualitas untuk bergabung dalam Kerajaan Allah	30
3. 5. Kristologi dan Pembebasan dalam Keberagaman Agama-agama	31
3. 5. 1. Pandangan Teologi Agama-agama Aloysius Pieris	32
3. 5. 2. Kekristenan, Pembebasan, dan Keberagaman Agama	32
3. 5. 3. Pembebasan Asia dan Keberagaman Agama	33
3. 6. Gereja, Kemiskinan, dan Identitas	33
3. 7. Kesimpulan Teologi Pembebasan Aloysius Pieris	35
Bab 4 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan Teologi Pembebasan sebagai Nafas yang Sama.	37
4. 1. “Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan Pembebasan dari Allah bagi Semua Orang	37
4. 2. Perjuangan dari Atas dan Perjuangan dari Bawah	38
4. 3. Mengutamakan Orang Miskin dalam Mewujudkan Sila ke-lima dan Menghadirkan Kerajaan Allah	39
4. 4. Diakonia sebagai Praksis Perwujudan Visi Keadilan dan Pembebasan	41
4. 4. 1. Jenis-jenis Diakonia	41
4. 4. 2. Kelemahan Jenis Diakonia Karitatif dan Diakonia Reformatif	43
4. 4. 3. Diakonia Transformatif sebagai Praksis Perwujudan Visi Keadilan dan Pembebasan	44
4. 5. Pembebasan dan Keadilan Sosial dalam Perjumpaan dengan Keberagaman agama-agama di Indonesia	45
4. 6. Solidaritas dalam Keadilan Sosial dan Pembebasan	46
4. 7. Kesimpulan	47
Bab 5 Kesimpulan dan Penutup	49
5. 1. Jawaban bagi Pertanyaan Penelitian	49
5. 2. Masukan dan Saran bagi Gereja di Indonesia	52

5. 3. Penutup	53
Daftar Pustaka	54

©UKDW

ABSTRAK

Sila ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ dalam Dialog dengan Teologi Pembebasan Aloysius Pieris

Aloysius Pieris sebagai salah satu teolog pembebasan Asia mengemukakan bahwa ada dua konteks yang menjadi ciri yakni kemiskinan dan keberagaman religiusitas. Konteks yang pertama, yakni kemiskinan, merupakan persoalan yang harus diatasi. Persoalan kemiskinan dapat ditemukan juga di Indonesia, sebagai salah satu negara besar di Asia. Kemiskinan di Indonesia terjadi karena adanya struktur yang menindas, yang dipegang oleh orang-orang yang dikuasai ketamakan dan kerakusan akan harta dan kekuasaan. Padahal Indonesia memiliki dasar ideologi yang berpihak pada keadilan, yakni Pancasila, terkhusus sila ke-lima. Sila ke-lima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” jelas mengatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial. Dalam konteks kemiskinan, yang hilang dari keadilan sosial ialah kesejahteraan. Orang-orang miskin dan tidak berdaya hidup dalam kekurangan dan keadaan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu diperlukan tindakan menuju keadilan sosial, dengan perspektif pembebasan. Keadilan sosial dan pembebasan dari kemiskinan dicapai dengan membantu orang-orang miskin.

Kata Kunci: Teologi pembebasan, keadilan sosial, kristologi, Pancasila, kemiskinan, ketidakadilan, kesejahteraan

x+56 halaman; 2016

34 (1982-2016)

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. J. B. Giyana Banawiratma

ABSTRAK

Sila ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ dalam Dialog dengan Teologi Pembebasan Aloysius Pieris

Aloysius Pieris sebagai salah satu teolog pembebasan Asia mengemukakan bahwa ada dua konteks yang menjadi ciri yakni kemiskinan dan keberagaman religiusitas. Konteks yang pertama, yakni kemiskinan, merupakan persoalan yang harus diatasi. Persoalan kemiskinan dapat ditemukan juga di Indonesia, sebagai salah satu negara besar di Asia. Kemiskinan di Indonesia terjadi karena adanya struktur yang menindas, yang dipegang oleh orang-orang yang dikuasai ketamakan dan kerakusan akan harta dan kekuasaan. Padahal Indonesia memiliki dasar ideologi yang berpihak pada keadilan, yakni Pancasila, terkhusus sila ke-lima. Sila ke-lima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” jelas mengatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial. Dalam konteks kemiskinan, yang hilang dari keadilan sosial ialah kesejahteraan. Orang-orang miskin dan tidak berdaya hidup dalam kekurangan dan keadaan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu diperlukan tindakan menuju keadilan sosial, dengan perspektif pembebasan. Keadilan sosial dan pembebasan dari kemiskinan dicapai dengan membantu orang-orang miskin.

Kata Kunci: Teologi pembebasan, keadilan sosial, kristologi, Pancasila, kemiskinan, ketidakadilan, kesejahteraan

x+56 halaman; 2016

34 (1982-2016)

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. J. B. Giyana Banawiratma

Bab 1

Pendahuluan

1. 1 Latar Belakang

Keadilan menjadi salah satu persoalan di abad ke-21 ini. Persoalan keadilan muncul karena jauhnya ketimpangan antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Ketimpangan ini tidak hanya soal harta saja, melainkan menyangkut banyak aspek kehidupan seperti sosial dan politik. Kekayaan orang-orang kaya membuat mereka seolah-olah memiliki gerak dan akses yang leluasa terhadap berbagai fasilitas dan sumber daya yang ada. Sedangkan orang-orang miskin harus rela untuk hidup apa adanya dari keterbatasan yang mereka miliki, yakni rumah sederhana, bekerja seadanya, makan sedapatnya, dan pendidikan dasar saja (bahkan tidak mampu dipenuhi).

Gambaran kemiskinan tersebut perlu diberi batasan. Kemiskinan disini merupakan kemiskinan yang tidak diakibatkan oleh kesalahan atau kemalasan dari orang-orang miskin tersebut. Persoalan kemiskinan ini menyangkut persoalan ketidakadilan secara struktural:

“Sebagian besar merupakan akibat ketimpangan dalam proses-proses pembagian hasil produksi dalam masyarakat. Kemiskinan untuk sebagian terbesar merupakan akibat *ketidakadilan struktural* atau dipakai juga istilah *kemiskinan struktural*. Maksudnya kemiskinan bukanlah akibat kehendak jelek orang miskin sendiri, (misalnya ia malas atau suka main judi) atau orang kaya (misalnya ia pribadi yang rakus), melainkan akibat strukturisasi proses-proses *ekonomis, politik* (bahwa hanya sekelompok kecil menguasai sarana-sarana produksi dan pengambilan keputusan mengenai kehidupan masyarakat), *sosial* (misalnya hak-hak tradisional golongan atas), *budaya* (misalnya perbedaan akses terhadap pendidikan), dan *ideologis*, bahwa masyarakat dibelenggu paham yang menutupi ketidakadilan kemiskinan dan memperlihatkannya sebagai akibat faktor objektif belaka.”¹

¹ F. Magnis-Suseno, “Keadilan dan Analisis Sosial: Segi-segi Etis”, dalam J. B. Banawiratma (ed.), *Kemiskinan dan Pembebasan* (Yogyakarta: Kanisius, 1987) hal 38.

Realita kemiskinan di Negara Indonesia dapat dilihat melalui data sensus pada tahun 2003, dengan jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 28.550.000.000 orang yakni masa itu sebanyak 11,47% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia dengan ukuran per kapita 275.779 rupiah per bulan.² Angka tersebut memang bukan angka persisnya tetapi memberikan gambaran yang jelas bahwa realita kemiskinan masih sangat besar di Indonesia.

Ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan kemiskinan tersebut tidak sesuai dengan dasar ideologi Negara Indonesia, yakni Pancasila. Dalam Pancasila terdapat dua kata “adil” yakni dalam sila ke-dua dan sila ke-lima. Dalam sila ke-dua, kata “adil” disebutkan apa adanya, berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Namun dalam sila ke-lima kata adil tersebut mendapat imbuhan “ke – an” sehingga adil bukan hanya berupa kata sifat melainkan menjadi kata benda. Sila ke-lima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” jelas bertentangan dengan situasi yang ada, yakni ketidakadilan karena struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Sebelum terjadi penyempurnaan redaksional, sila ke-lima pada sejarah perumusan Pancasila pernah berbunyi “kesejahteraan sosial.”³ Prinsip kesejahteraan sosial tersebut juga merupakan satu dari lima prinsip yang dikemukakan anggota-anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dalam merespon permintaan ketua BPUPKI, Radjiman, mengenai dasar Negara Indonesia, bersama dengan empat prinsip lain yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai demokrasi permusyawaratan.⁴

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengatakan bahwa sebagai dasar negara, ideologi, falsafah, dan pandangan hidup masyarakat, Pancasila mengandung nilai dasar atau intrinsik, nilai instrumental, dan nilai praktis. Pancasila juga memiliki dimensi realita, idealisme, serta fleksibilitas, dan kesejahteraan. Terkhusus sila ke-lima Sri Sultan memberi perhatian, bahwa aktualisasi Pancasila dimulai dengan urutan terbalik, yakni dari sila ke-lima dahulu sebagai yang paling dasar, yakni dari “Keadilan Sosial.” Sila ke-lima secara sosiologis menjadi tuntutan fundamental yang harus diwujudkan terlebih dahulu. Apabila perwujudan sila ke-lima sudah kuat, makan jalan menuju empat sila lainnya akan lebih mudah.⁵

² bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494 diakses 27 Agustus 2015.

³ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014) hal. 25.

⁴ *Ibid.* hal. 10.

⁵ Sri Sultan Hamengkubuwono, *Sambutan dan Ceramah Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) 2014*, (tidak diterbitkan) Yogyakarta, 12 Mei 2014.

Perhatian kepada sila ke-lima yang dilihat melalui Pembukaan UUD (Undang-undang Dasar) 1945 diberikan oleh Notonagoro dan Yudi Latif. Dalam paragraf ke-4 Pembukaan UUD 1945, terdapat empat tugas negara yakni “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (1), dan untuk memajukan kesejahteraan umum (2), mencerdaskan kehidupan bangsa (3), dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (4) yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” yang semuanya ini “berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Keduanya melihat adanya kata-kata “serta dengan mewujudkan suatu” sebelum sila ke-lima disebutkan. Hal ini menunjukkan bahwa sila ke-lima merupakan sila yang konkret.⁶

Selain itu, pada bagian empat tugas negara, “keadilan sosial” juga disebutkan sebagai salah satu dasar untuk melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini menunjukkan peran dan tugas Negara Indonesia dalam keterlibatannya tidak hanya bagi negara sendiri melainkan dalam lingkungan kemanusiaan yang lebih luas, hingga melintasi batas-batas negara. Dengan demikian perjuangan bagi “keadilan sosial” melampaui batas-batas formal kenegaraan.

Selain melampaui batas-batas formal kenegaraan, perjuangan “keadilan sosial” juga melampaui waktu. Perjuangan bagi kesejahteraan dan kemakmuran sudah diperlihatkan oleh Bangsa Indonesia dalam memerjuangkan tanah airnya dari bangsa lain yang menjajah. Kesadaran akan ketertindasan sudah bangkit sejak Bangsa Indonesia menyadari bahwa penjajahan oleh bangsa lain membawa kesengsaraan dan kemiskinan. Perjuangan dan pemikiran selama bertahun-tahun tentang kesejahteraan dan keadilan kemudian tertuang dalam salah satu sila dalam Pancasila.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa sila ke-lima pernah berbunyi “kesejahteraan sosial”, dapat dilihat bahwa pada masa perumusan Pancasila, itulah konteks yang sedang diperjuangkan para pendiri bangsa. Konteks pada masa perumusan dasar negara tersebut ialah ketika Negara Indonesia belum merdeka dan berada di bawah pengaruh penjajah Jepang. Setelah semakin menyadari bahwa penjajahan yang menimpa Bangsa Indonesia selama ratusan tahun sejak penjajahan Portugis, Spanyol, dan Belanda, para perumus ideologi negara memikirkan dan memasukkan prinsip kesejahteraan dan keadilan tersebut sebagai hal yang penting dan mendesak untuk dituangkan dalam ideologi negara.

⁶ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984) hal. 10 dan Yudi Latif, *Negara Paripurna*, hal. 606.

Mohammad Hatta, dkk., menyatakan bahwa sila ke-lima tidak saja menjadi dasar, namun juga menjadi tujuan yang harus dicapai sebagai langkah menentukan Indonesia yang adil dan makmur. Untuk mencapainya diperlukan langkah praktis dan konkret yakni melaksanakan UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”⁷ Hal ini penting karena selain terkait dengan pemenuhan kebutuhan penghidupan secara ekonomi juga merupakan pemenuhan aktualisasi diri. Keadilan dan kesejahteraan menjadi kunci yang penting di sini.

Baik Mohammad Hatta dkk., Sri Sultan Hamengkubuwono, Notonagoro, dan Yudi Latif, semuanya mengemukakan pentingnya kedudukan dan perhatian sila ke-lima. Pemenuhan kesejahteraan dalam sila ke-lima dipenuhi terlebih dahulu karena secara praktis, masyarakat tidak dapat bertahan tanpa memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi penting karena tanpa hal itu, seseorang atau kelompok masyarakat akan kesulitan bertahan hidup dan menghadirkan diri sepenuhnya bagi masyarakat luas. Apabila masyarakat berkecukupan dalam memenuhi kebutuhannya alias kesejahteraan terjadi, maka prinsip dalam empat sila yang lain akan diyakini lebih mudah dicapai.

Selanjutnya yang menghalangi pemenuhan kesejahteraan dan keadilan ialah adanya krisis. Krisis tersebut antara lain persoalan kemiskinan, kemarjinalan, dan ketidakadilan. Kemiskinan (mutlak) adalah keadaan suatu subyek individu atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang primer, semisal sandang, pangan, papan, sanitasi yang layak, pekerjaan, pendidikan, apalagi kebutuhan sekunder seperti rekreasi.⁸ Kemarjinalan berarti suatu subyek yang tersisihkan dari konsentrasi aktivitas sosial yang penting. Sedangkan ketidakadilan menyangkut persoalan pembagian hak dan kebutuhan serta kewajiban tertentu dalam dimensi yang kompleks. Persoalan-persoalan demikian masih terasa dalam konteks Indonesia masa kini. Persoalan tersebut merupakan sebagian dari perwujudan absennya kesejahteraan. Oleh karena itu prinsip keadilan sosial penting untuk ditekankan.

Pengembangan ideologi Pancasila terkhusus sila ke-lima beserta pemahaman dan implementasinya, juga berkaitan erat dengan perubahan sosial dan pembangunan (nasional). Djaka Soetapa mengatakan bahwa pembangunan dapat dipahami sebagai “perubahan sosial yang sebesar-besarnya untuk membebaskan manusia dan masyarakat dari keadaan yang menurunkan kehormatan dan martabatnya.” Perubahan tersebut tidak hanya mencakup aspek sosial, ekonomi,

⁷ Mohammad Hatta, dkk., *Uraian Pancasila* (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1984), hal. 46.

⁸ J. B. Banawiratma dan J. Muller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 126.

politik, dan sebagainya, melainkan juga mencakup unsur manusia yang turut berubah seiring pembangunan tersebut. Dalam perubahan tersebut, manusia mengalami penyesuaian-penyesuaian terhadap situasi. Mereka akan mengevaluasi nilai-nilai yang mereka miliki. Nilai-nilai tersebut ditantang untuk menghadapi terjadinya pembangunan dan perubahan, sehingga subyeknya sedikit-banyak dituntut baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tetap ambil bagian dalam pembangunan dan perubahan tersebut. Dalam situasi yang demikian, Djaka Soetapa menegaskan bahwa “bagi umat Kristen, maka yang harus dilakukan ialah kembali ke Kitab Suci dan melihat apa yang dikehendaki oleh Allah bagi alam semesta dan bagi manusia.” Bagi Djaka Soetapa, karena dalam kehidupan warga Negara Indonesia agama masih memiliki peranan yang vital, “teologi menjadi sangat penting peranannya dalam pembangunan nasional.”⁹

Bagaimana kemudian kekristenan akan bertemu dengan prinsip dalam sila ke-lima tersebut? Salah satu landasan berteologi dan/atau beriman dalam kekristenan ialah kristologi. Kristologi membahas segala sesuatu mengenai Yesus Kristus. Kristologi secara umum dibagi menjadi dua bagian yakni “kristologi dari atas” dan “kristologi dari bawah”. “Kristologi dari atas” melihat relasi Yesus Kristus yang berasal dari Allah. Dalam hal ini, Allah yang menjadi manusiawi. Dari pemikiran ini berkembang pemahaman bahwa Yesus sudah ada pada Allah sejak semula, lalu sebagai tokoh ilahi, Ia turun ke dunia menjadi manusia. Sedangkan “kristologi dari bawah” melihat refleksi atas Yesus ketika hidup sebagai manusia. Yesus mengalami hal-hal yang dialami manusia fana, termasuk kesengsaraan dan kematian. Setelah kematiannya, Yesus mendapatkan ciri ilahi, dimuliakan dan dijadikan Kristus (Mesias) dan Tuhan (*Kyrios*) (Kisah Para Rasul 2:36 dan Roma 1:4).¹⁰

Pendekatan “kristologi dari bawah” yang akan dipilih dan diangkat untuk membuka peluang mendekati persoalan yang terkait dengan prinsip keadilan sosial dalam sila ke-lima. Penggalan terhadap Yesus Kristus tentu saja memiliki dimensi sosial, kemanusiaan, bahkan politik. Hal ini akan sejalan dengan penggalan terhadap sila ke-lima sebagai ideologi, nilai, dan prinsip, tetapi terutama sebagai konteks dari cita-cita Negara Indonesia. Maka mempertemukan kedua konsep ini yang akan dibicarakan dalam keseluruhan tulisan ini.

Secara khusus, kristologi dari bawah yang dibahas ialah kristologi yang berkaitan dengan teologi pembebasan Aloysius Pieris. Tokoh Aloysius Pieris dipilih karena pemikiran dan perhatiannya

⁹ Disarikan berdasarkan uraian Djaka Soetapa, “Agama dan Pembangunan (Perspektif Kristen)”, dalam M. Masyhur Amin (ed.), *Moralitas Pembangunan: Perspektif Agama-agama di Indonesia* (Yogyakarta: Lajnah Kajian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta {LKPSM-NU-DIY} 1989), hal. 47.

¹⁰ J. B. Banawiratma (ed.), *Kristologi dan Allah Tritunggal* (Yogyakarta: Kanisius 1986), hal. 29-31.

terhadap konteks dan realitas Asia. Dua konteks yang dikemukakannya, yakni kemiskinan dan keberagaman agama, benar-benar merupakan konteks yang terdapat di Asia. Konteks ini terutama sangat terasa di Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman agama dan situasi kemiskinan. Oleh karena itu, teologi pembebasan Pieris akan cocok digunakan untuk berdialog dengan sila ke-lima yang membahas persoalan keadilan.

Teologi pembebasan oleh Pieris terutama menekankan Yesus Kristus sebagai pusat teologinya. Tindakan pembebasan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang dimaksudkan Pieris berpusat pada Yesus Kristus dan karya tindakannya. Oleh karena itu, dalam pembahasan tentang teologi pembebasan Pieris, akan dilihat perjuangan dan tindakan Yesus Kristus bagi orang-orang miskin dan termarjinalkan. Dari sinilah akan dibangun dialog dengan sila ke-lima.

Sekalipun menekankan pada kristologinya, terma atau frasa yang digunakan untuk menyebut pendekatan oleh Aloysius Pieris menggunakan kata-kata “teologi pembebasan.” Dari sini penyusun hendak menunjukkan bahwa dalam teologi pembebasan Pieris, kristologi memiliki peranan penting, sehingga kemudian nampak keduanya tidak terpisahkan, antara kristologi dengan teologi pembebasan. Teologi pembebasan menekankan Kristus sebagai fokus utamanya. Oleh karena itu juga, teologi pembebasan tidak terpisahkan dari kristologi.

Dalam dialog dengan sila ke-lima, kristologi dalam teologi pembebasan Pieris akan didialogkan sehingga menjadi kristologi yang kontekstual. Bagi Banawiratma, tidak ada kristologi yang tidak kontekstual, kecuali kristologi tersebut tidak disadari konteksnya, lalu dikomunikasikan dan diterima begitu saja tanpa peduli konteks tempat kristologi itu dijalankan.¹¹ Oleh karena itu dialog antara teologi pembebasan, sebagai kristologi juga, inti iman Kristen, akan dikomunikasikan dalam dialog dengan sila ke-lima, sebagai konteks cita-cita dan sebagai ideologi dari Negara Indonesia, agar keduanya bertemu dan saling memperkaya.

Topik ini kemudian menjadi penting karena berupaya membangun pemahaman iman yang berkesinambungan dan integratif dengan salah satu cita-cita nasional. Baik iman Kristen dalam kristologi melalui teologi pembebasan oleh Pieris, maupun ideologi nasional, terkhusus melalui sila ke-lima, keduanya merupakan konteks yang tidak terpisahkan dari orang Kristen Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya dibangun konsep yang menghidupi keduanya sekaligus dalam hidup beriman juga berbangsa dan bernegara.

¹¹ J. B. Banawiratma, “Kristologi Kontekstual”, dalam *Jatuh Bangun! Jatidiri Kristiani dalam Sorotan. Orientasi Baru, Pustaka Filsafat dan Teologi no 7 tahun 1993* (Yogyakarta: Kanisius 1993), hal. 235.

1. 2. Judul Penelitian

Judul dari penelitian ini adalah “Sila ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ dalam dialog dengan Teologi Pembebasan Aloysius Pieris”. Judul ini menunjukkan isi dari keseluruhan tulisan ini yang mempertemukan teologi pembebasan Aloysius Pieris dengan pembahasan tentang sila ke-lima. Pertemuan kedua ide tersebut dalam rangka membentuk dialog kritis yang kontekstual.

1. 3. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana sila ke-lima dengan teologi pembebasan Aloysius Pieris berjalan bersama dalam dialog?

Pertanyaan penelitian ini menggunakan kata tanya “bagaimana” dan bukan kata tanya “apa.” Apabila menggunakan kata tanya “apa” maka jawabannya merupakan serangkaian obyek atau hal atau benda yang dicari dan dihadirkan untuk memenuhi jawaban pertanyaan tersebut. Kesan dari hal ini ialah jawaban akan cenderung statis. Namun pertanyaan dengan kata tanya “bagaimana” bertujuan bahwa jawaban yang akan digali merupakan suatu proses analisis, dan bukan suatu akhiran yang tertutup.

1. 4. Batasan Penelitian

Sila ke-lima akan dibahas sekilas tentang sejarah pembentukannya. Kemudian akan dipaparkan pendapat beberapa tokoh dan penulis tentang pandangannya terhadap sila ke-lima. Sedangkan untuk teologi pembebasan hanya akan dipaparkan teologi pembebasan oleh Aloysius Pieris.

1. 5. Tujuan Penelitian

Mempertemukan dua konsep antara ideologi nasional dengan iman Kristen. Ideologi nasional yang diambil dari sila ke-lima yang dipertemukan dengan salah satu konsep dalam iman Kristen, kristologi, yang dalam hal ini digali melalui teologi pembebasan oleh Aloysius Pieris. Perjumpaan ini dalam rangka membangun penghayatan akan kemanusiaan dan krisisnya, serta upaya-upaya untuk mengatasi krisis itu. Pemahaman yang muncul nantinya akan membantu membentuk sikap kritis dan penghayatan dari perpaduan kekristenan dengan salah satu cita-cita nasional.

1. 6. Metode Penelitian

Metode penelitian tulisan ini dilakukan dengan melakukan telaah dan studi kepustakaan.

1. 7. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bagian ini menguraikan bagaimana penyusun bisa sampai ke topik penelitian ini dan mengapa topik ini penting.

Bab 2 Sejarah dan berbagai Pandangan mengenai Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Bab ini pertama-tama menguraikan sejarah pembentukan Pancasila, dimana akan dilihat bahwa sila ke-lima tidak memiliki dinamika tertentu yang signifikan dalam perdebatan. Sila ini diterima oleh semua kalangan. Kemudian akan disajikan pemikiran beberapa tokoh dari masa Soekarno, Soeharto, dan reformasi dan sesudahnya, tentang pandangannya mengenai sila ke-lima.

Bab 3 Teologi Pembebasan menurut Aloysius Pieris

Teologi pembebasan ini sebagaimana diungkapkan di atas, berisi uraian kristologis. Kristus yang menjadi pusat dari teologi pembebasan. Teologi pembebasan akan melihat kaitan-kaitan antara Yesus dengan kemiskinan, Kerajaan Allah, mamon, dan keberagaman agama.

Bab 4 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan Teologi Pembebasan sebagai Nafas yang Sama

Bab ini berisi dialog perjumpaan dari kedua pemikiran diatas, yakni sila ke-lima dengan kristologi melalui teologi pembebasan Aloysius Pieris. Di dalamnya juga akan dibahas diakonia, terkhusus diakonia transformatif, sebaga praxis dan langkah konkrit mewujudkan keadilan sosial dan pembebasan dari kemiskinan dan ketidakadilan.

Bab 5 Penutup

Bab ini berisi penutup keseluruhan tulisan ini.

Bab 5

Kesimpulan dan Penutup

5. 1. Jawaban bagi Pertanyaan Penelitian dan Kesimpulan

Pertanyaan penelitian di awal tulisan ini ialah “bagaimana sila ke-lima dengan teologi pembebasan Aloysius Pieris berjalan bersama dalam dialog?” Oleh karena pertanyaan menggunakan kata tanya “bagaimana”, maka jawaban pertanyaan ini merupakan proses berpikir yang runtut dan paralel. Pertama-tama baik ideologi Negara Indonesia dalam sila ke-lima maupun teologi pembebasan Aloysius Pieris memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan dan pembebasan dari belenggu sistem dan struktur yang memiskinkan, tidak adil, dan tidak menyejahterakan.

Pandangan dan pendapat serta pemahaman terhadap sila ke-lima ada beragam. Sila yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” ini dilihat sebagai sila yang memerlukan penekanan dan perhatian karena persoalan kesenjangan sosial-ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Keberadaan orang-orang miskin di tengah-tengah masyarakat tidak diperhitungkan keberadaannya dan dipandang sebelah mata dan tersisihkan atau termarginalkan dari dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang vital. Mereka juga merupakan kaum yang tidak dapat mengakses fasilitas umum dan infrastruktur dan pembangunan yang diadakan oleh negara. Peristiwa ini, berlawanan dengan kemanusiaan, sebagaimana sila ke-dua berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan bersama sila ke-lima, mengandung kata “adil”. Dengan demikian, persoalan keadilan menjadi jelas dan sesuatu yang mendesak.

Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan dasar utama untuk membuat undang-undang dan peraturan yang dijalankan oleh pemerintah. Berbagai undang-undang dan peraturan yang merupakan turunan dari sila ke-lima telah banyak disusun. Akan tetapi kemiskinan dan kesenjangan serta kaum termarginalkan tetap ada di bumi Indonesia. Persoalannya di sini dibatasi pada adanya struktur dan sistem yang mengakibatkan dan memelihara kemiskinan diantara masyarakat.

Teologi pembebasan dengan nafas yang sama, berbicara tentang kaum miskin dan tidak berdaya. Teologi pembebasan berangkat dari gerakan Yesus yang memberikan hidupnya untuk berpelayanan bagi yang miskin dan tidak berdaya. Yesus membawa dan mewartakan Kerajaan

Allah sebagai wujud kuasa dan kasih Allah yang ditujukan kepada manusia, terkhusus kepada kaum miskin dan tidak berdaya. Yesus mengajarkan bahwa Allah bermusuhan dengan mamon. Mamon adalah suatu daya yang menguasai manusia dengan keserakahan, ketamakan, dan keegoisan. Manusia yang dikuasai mamon inilah yang kemudian membentuk sistem baik sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya dan ideologi, yang menciptakan kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan.

Mamon yang menguasai manusia, bekerja di dalam struktur dan sistem yang ada. Struktur tersebut bisa berupa struktur pemerintahan dan sistem pasar. Dinamika politik pemerintahan dan struktur pasar merupakan sistem yang sangat rentan dikuasai oleh mamon. Mereka yang ada didalam sistem tersebut melakukan berbagai upaya untuk menumpuk keuntungan bagi dirinya sendiri dan korporasinya. Mereka menumpuk kekayaan dan mengejar kekuasaan, juga dengan kekayaan yang mereka miliki. Pelaku politik dan pasar yang dikuasai mamon, akan memanfaatkan sistem yang ada untuk menguasai sumber daya alam dan fasilitas pembangunan yang ada untuk mengembangkan usaha mereka. Apabila sumber daya alam dan infrastuktur dan fasilitas hasil pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir elit, maka rakyat kecil dan miskin tidak memiliki akses terhadap sumber daya, fasilitas, dan infrastuktur tersebut. Tanpanya, hidup mereka berkekurangan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inilah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem yang menindas dan tidak adil, atau oleh Pieris disebut *forced poverty*. Inilah gambaran dari struktur yang menindas.

Struktur dan sistem ekonomi dan politik yang rentan terhadap penguasaan mamon sehingga mengakibatkan kemiskinan dan ketidakadilan, akan sangat sulit diubah melalui pendekatan terhadap struktur ekonomi dan politik tersebut. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai selama ada rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Teologi pembebasan meneladan gerakan Yesus yang berjuang dari aras akar rumput, dari bawah, dari tengah-tengah masyarakat. Pendekatan yang dilakukan Yesus ialah pertama-tama berada langsung ditengah-tengah situasi kemiskinan. Ditengah-tengah situasi kemiskinan tersebut Yesus menolong dan menyembuhkan mereka yang miskin, sakit, lemah, dan tidak berdaya, sertaewartakan harapan Kerajaan Allah bagi mereka. Gerakan dari bawah sebagaimana Yesus lakukan dan perjuangkan, pertama-tama menyentuh langsung kepada kaum miskin, tertindas, dan tidak berdaya.

Yesus diyakini dan diimani orang percaya yang tergabung dalam komunitas orang beriman. Persekutuan orang beriman berkumpul dalam gereja. Gereja ialah komunitas yang meneladan

Yesus. Dengan demikian, gereja dipanggil untuk turut bersolidaritas terhadap kaum miskin dan tidak berdaya. Gereja dipanggil untuk melayani. Ketika ada mereka yang miskin dan tidak berdaya dilayani dan ditolong, Kerajaan Allah sedang dinyatakan ditengah-tengah dunia, dan kasih Allah sedang mengalir di antara manusia. Gerakan pelayanan dan solidaritas diupayakan melalui gerakan akar rumput, yang menyentuh langsung kepada kaum miskin dan tidak berdaya. Salah satu langkah praktis dari tindakan pelayanan tersebut ialah dengan diakonia. Secara lebih spesifik, diakonia yang dimaksud ialah diakonia transformatif atau pembebasan.

Diakonia transformatif menjadi pendekatan yang dipilih dalam pelayanan kepada orang-orang miskin karena tidak hanya berorientasi kepada bantuan fisik dengan memberi modal usaha dengan teknologi dan sarana yang memadahi untuk berproduksi, dan mengasah kemampuan untuk menggunakan teknologi tersebut, melainkan juga berfokus kepada upaya penyadaran dan pembentukan pola pikir yang kritis. Pertama-tama orang miskin dan tidak berdaya perlu disadarkan bahwa mereka merupakan bagian dari struktur yang tidak adil dan mengalami kesenjangan dari yang kaya. Penyadaran ini dilakukan juga dengan memberitahukan hal apa saja yang menjadi hak mereka, antara lain hak untuk hidup layak, kesamaan di mata hukum, dan hak untuk mengembangkan diri. Kesadaran akan hak ini diharapkan akan mengangkat semangat hidup kaum miskin dan tidak berdaya, agar tidak hidup dalam pemikiran pesimis dan tanpa harapan.

Selain pengetahuan dan kemampuan tentang teknologi dan sarana produksi serta kesadaran akan hak hidupnya, orang-orang miskin dan termarjinalkan diberdayakan dengan pengorganisasian dan dorongan meningkatkan partisipasi dalam masyarakat. Orang-orang yang dibantu tersebut kelak tidak hanya akan hidup dan berjuang untuk dirinya sendiri, melainkan dengan kesadaran bahwa mereka ada untuk orang lain yang pernah mengalami kemiskinan seperti mereka. Di sini, solidaritas dan gotong-royong dalam masyarakat menjadi penting untuk dilakukan karena tujuannya ialah mengangkat hidup sebanyak mungkin kaum miskin dan tertindas agar menjadi rakyat yang berdaya juang untuk mengangkat kualitas kehidupannya.

Diakonia transformatif merupakan upaya pembebasan karena berupaya membebaskan orang miskin dan tertindas dari himpitan kemelaratan ekonomi. Tidak hanya itu, upaya pembebasan juga dilakukan dengan penyadaran, memberi pengetahuan tentang dinamika sosial, politik ekonomi, serta membentuk pemikiran kritis atas kehidupan. Penyadaran sangat penting untuk melepaskan orang miskin dan tidak berdaya dari penindasan yang sifatnya ideologis. Mereka yang miskin seringkali dianggap tidak mampu mengangkat kehidupan mereka menjadi lebih

layak. Hal ini menekan semangat dan harapan mereka untuk berjuang. Maka perlu dilawan dengan penyadaran, yang didampingi dengan berbagai bantuan fisik dan pelatihan keterampilan.

Tujuan diakonia transformatif dan pembebasan sejalan dengan tujuan yang dicita-citakan dalam sila ke-lima, yakni kesejahteraan. Kesejahteraan adalah keadaan masyarakat Indonesia yang berkecukupan, makmur, dan berkelanjutan. Kesejahteraan ini tidak hanya untuk golongan tertentu saja, apapun latar belakangnya, melainkan untuk setiap warga negara Indonesia yang berada dalam naungan Pancasila. Setiap warga negara yang hidupnya melarat, harus dibebaskan dari kemiskinannya dengan pendekatan transformatif yang mengubah kehidupan dan membangkitkan kesadaran akan kehidupan. Dengan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Kerajaan Allah sedang dinyatakan di bumi Indonesia.

5. 2. Saran bagi Komunitas Kristen di Indonesia

Saran bagi komunitas Kristen di Indonesia ialah bahwa mereka dipanggil untuk bertindak aktif dalam pelayanan dan perjuangan pembebasan. Pelayanan dan pembebasan ditujukan kepada kaum miskin dan tertindas oleh sistem dan struktur yang tidak adil. Orang-orang miskin dibebaskan dengan upaya konkrit, salah satunya ialah diakonia transformatif. Orang-orang miskin tidak hanya diberikan bantuan dan sarana untuk berproduksi secara ekonomi (karitatif dan reformatif), tetapi harus disadarkan secara pola pikir dan mental. Keadilan sosial berarti keadilan dalam hak dan kewajiban. Salah satu haknya ialah kehidupan yang sejahtera, layak, dan terjamin. Apabila orang-orang miskin diberdayakan secara kemampuan, sarana, dan mental, maka mereka dapat memiliki daya untuk mengangkat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kehidupan yang demikian dicapai dengan berusaha dan berkarya sehingga mendatangkan berkat dan penghasilan bagi kehidupan orang miskin itu sendiri.

Orang-orang yang dijumpai dalam tindakan pelayanan dan pembebasan itu adalah orang-orang dengan berbagai perbedaan dan latar belakang. Salah satunya ialah perbedaan keyakinan dan agama. Agama mayoritas di Indonesia ialah Agama Islam, sehingga tidak sedikit peluang bagi komunitas Kristen untuk menjumpai orang-orang miskin yang beragama non Kristen, terkhusus yang beragama Islam. Kepada mereka yang berbeda keyakinan tersebut, komunitas Kristen perlu menghayati Kristus yang mereka jumpai dalam diri orang-orang miskin yang mereka sentuh dengan kasih Allah. Dengan penghayatan yang demikian, orang-orang Kristen dapat semakin dikuatkan iman dan keyakinannya, juga membuka diri untuk berelasi dengan orang-orang beragama dan berkeyakinan lain.

5. 3. Penutup

Perjuangan keadilan dan pembebasan dari ketidakadilan dan kemiskinan dilakukan dengan menyentuh langsung kepada kaum miskin dan tidak berdaya. Namun perjuangan pembebasan dapat dikatakan belum selesai. Pieris dan Banawiratma mengemukakan bahwa pembebasan itu ditujukan bagi semua orang, baik kepada yang kaya maupun orang miskin. Rahmat dan kasih Allah dinyatakan bagi semua orang, dan semua orang harus dibebaskan dari ketamakan dan kerakusan. Perjuangan bagi kaum miskin dapat mengentaskan kemiskinan dan pembebasan terjadi.

Akan tetapi sebetulnya struktur yang menindas tetap ada. Keberadaan struktur dan sistem yang tidak berorientasi kepada kesejahteraan rakyat kecil kontraproduktif dengan perjuangan pembebasan kaum miskin. Mamon yang menjadi musuh Allah bisa menguasai setiap orang dengan ketamakan dan kerakusan. Harta dan kekuasaan menjadi godaan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan diri dan golongannya sendiri. Orang miskin yang telah menerima pelayanan transformatif bisa mengembangkan kesadaran bahwa ketamakan adalah musuh utama Allah dan umatNya. Mereka yang telah dibebaskan dan ditransformasi hendaknya dapat menjadi pribadi yang hidupnya melawan mamon baik dalam dirinya maupun turut menyadarkan orang lain. Akan tetapi, pembebasan orang-orang kaya dan golongan elit dari mamon, menjadi perjuangan pembebasan dalam babak baru. Oleh sebab itu perjuangan pembebasan akan selalu diperlukan, baik perjuangan pembebasan kepada orang miskin maupun pembebasan orang-orang kaya dan mereka yang sudah sejahtera dari ketamakan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik & A. B. Lopian (ed.), *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 6*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2011.
- Amin, M. Masyhur (ed.), *Moralitas Pembangunan: Perspektif Agama-agama di Indonesia*, Yogyakarta: Lajnah Kajian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (LKPSM-NU-DIY) 1989.
- Banawiratma, J. B. & J. Muller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Banawiratma, J. B. (ed.), *Gereja Indonesia, Quo Vadis? Hidup Menggereja Kontekstual*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- _____, *Iman, Pendidikan, dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- _____, (ed.), *Kemiskinan dan Pembebasan*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- _____, (ed.), *Kristologi dan Allah Tritunggal*, Yogyakarta: Kanisius 1986.
- Dwikorlatno, Lani (ed.), *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Fauzi, Achmad, dkk., *Pancasila Ditinjau dari Segi Sejarah, Segi Yuridis Konstitusional, dan Segi Filosofis*, Malang: Lembaga Penerbitan Uniersitas Brawijaya, 1983.
- Hatta, Mohammad, *Membangun Ekonomi Indonesia: Kumpulan Pidato Ilmiah*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- _____, dkk., *Uraian Pancasila*, Jakarta: Penerbit Mutiara, 1984.
- Hodes, Robin, dkk., *Global Corruption Report 2004 by Transparency International*, London: Pluto Press, 2004.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Matondang, H. M. Victor (ed.), *Percakapan dengan Dr. T. B. Simatupang*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986.
- McGrath, Alister E., *Spiritualitas Kristen*, Medan: Bina Media Perintis, 2007.

Natar, Asnath N. & Robert Setio (eds.), *Malunya jadi Orang Indonesia*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2012.

Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1984.

Pieris, Aloysius, *Berteologi dalam Konteks Asia*, terjemahan Agus M. Hardjana, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

_____, *God's Reign for God's Poor: A Return to the Jesus Formula*, Gonawila-Kelaniya: Tulana Reseachr Centre, 1999.

_____, *The Genesis of an Asian Theology of Liberation*, Gonawala-Kelaniya: Tulana Research Centre, 2013.

Pranarka, A. M. W., *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1985.

Ricklefs, M. C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi, 2001.

Suryawasita, A., *Asas Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.

Widyatmaja, Yosef, *Diakonia sebagai Misi Gereja*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

_____, *Yesus dan Wong Cilik. Praksis Diakonia Transformatif dan Teologi Rakyat di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.

Tulisan yang tidak Diterbitkan

Hamengkubuwono, Sri Sultan, *Sambutan dan Ceramah Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) 2014*, (tidak diterbitkan) Yogyakarta, 12 Mei 2014.

Jurnal

Aloysis Pieris, "Asia's Non-Semitic Reigions and the Missions of the Churches", dalam *The Month Vol. CCLXIII No. 1374, March 1982*, London: The Month, 1981, hal. 81-90.

Aloysis Pieris, "A Theology of Liberation in Asian Churches", dalam *The Month Vol. CCLVII No. 1426, September 1986*, London: The Month, 1983, hal. 231-239.

Aloysius Pieris, "Christ Beyond Dogma: Doing Christology in the Context of the Religions and the Poor", dalam *Louvain Studies Vol. 25, no 3, Fall 2000*, Leuven: Louvain Studies, 2000, hal. 187-231.

Aloysius Pieris, "Spirituality and Liberation", dalam *The Month Vol. CCXLV, no. 1387, April 1983*, London: The Month, 1983, 118-124.

Aloysius Pieris, "To be Poor as Jesus was Poor?", dalam *The Way, July 1984*, London: The Way, 1984, hal. 186-197.

Georg Evers (Interview Conductor), "Religiousness and Poverty – The Collective Effort of Asian Theology: Interview with Aloysius Pieris, S.J., Sri Lanka", dalam *Yearbook of Contextual Theologies 2001*, Frankfurt: IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 2001, hal. 9-32.

J. B. Banawiratma, "Kristologi Kontekstual", dalam *Jatuh Bangun! Jatidiri Kristiani dalam Sorotan. Orientasi Baru, Pustaka Filsafat dan Teologi no 7 tahun 1993*, Yogyakarta: Kanisius 1993, hal. 233-241.

J. B. Banawiratma, "Teologi Lokal dalam Konteks Global", dalam *Gema Teologika Vol. 1, No. 1, April 2016*, Yogyakarta: Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, 2016, hal. 55-72.

Situs Internet

Badan Pusat Statistik, bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494 diakses 27 Agustus 2015.